



ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH (LPS) DI KOTA PEKANBARU

Mutia Fadillah Bahar, Sylvina Rusadi

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Abstrak

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang tidak luput dari masalah sampah. Persoalan sampah sepertinya tidak pernah terselesaikan secara baik. Pemandangan sampah yang berserakan, seakan menjadi hal yang lumrah. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru pada pertengahan tahun 2025 menyatakan secara resmi rencana transisi menuju sistem swakelola berbasis komunitas pada pelibatan Lembaga Pemungut Sampah (LPS), namun dalam penerapannya lembaga ini menimbulkan pro dan kontra untuk masyarakat. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan sampah oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kota Pekanbaru serta faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru, Tenaga Ahli LPS Kota Pekanbaru, RT dan RW di Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru serta masyarakat Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara serta analisis data secara deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, LPS dibentuk dengan tujuan masalah pengangkutan sampah dapat diatasi dengan cepat, namun masih terdapat permasalahan terkait dengan penerapannya salah satunya kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan menyebabkan penumpukan sampah. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kota Pekanbaru adalah : tingkat kesadaran masyarakat, ketersediaan lahan serta sarana prasarana.

Kata Kunci: Analisis, Pengelolaan, Sampah.

PENDAHULUAN

Sampah atau limbah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang banyak terjadi di perkotaan. Pertumbuhan pesat pada kawasan urban seiring dengan peningkatan pendapatan perkapita dan kompleksitas jenis kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut meningkatkan volume, jenis, dan karakteristik timbulan sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan oleh manusia beragam dari mulai plastik, kertas, limbah cair, limbah rumah tangga, sampai limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). Berbagai upaya pengelolaan sampah telah dilakukan baik secara terpusat, komunal, ataupun mandiri namun belum optimal karena kurangnya kapasitas penanganan dan komitmen masyarakat yang masih rendah (Amalia 2020). Pada akhirnya sampah yang tidak terkelola akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.

Pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Pengelolaan sampah yang tidak efektif akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan tempat tinggal manusia, sehingga pemerintah mengambil langkah proaktif dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, menentukan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Peraturan terkait pengelolaan sampah sangat penting adanya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peraturan tersebut dirancang untuk

mengurangi dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pemerintah berupaya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan dan daur ulang. Pemikiran utama di balik peraturan ini adalah tidak hanya untuk mengatasi masalah sampah secara langsung, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Selain itu, peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya dari sampah, seperti daur ulang dan pengolahan energi, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya peraturan yang kuat dan diterapkan secara konsisten, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi yang akan datang.

Pada tahun 2025 lalu pemerintah Kota Pekanbaru hanya memberikan kontrak 6 bulan dari 1 Januari 2025 sampai 2 Juli 2025 untuk pengangkutan sampah melalui pihak ketiga karena pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Sampah (LPS) per kelurahan untuk melakukan pengelolaan sampah dan menggantikan pihak ketiga. Pemko tidak lagi menggunakan pihak ketiga, dan menerapkan sistem swakelola. LPS telah dibentuk di tingkat RT/RW hingga kelurahan. LPS dibentuk agar sampah terkontrol dari asal hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Nantinya angkutan sampah yang ingin melakukan pengangkutan harus ada izin dari

RT/RW dan kelurahan, sehingga ada perizinan resmi dalam pengangkutan sampah ini.

Pengelolaan sampah di Pekanbaru kini dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) berbasis kelurahan, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 26 Tahun 2025 (www.cakaplah.beritapku.com). LPS dibentuk agar sampah terkontrol dari asal hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Nantinya angkutan sampah yang ingin melakukan pengangkutan harus ada izin dari RT/RW dan kelurahan. LPS yang terbentuk di setiap kelurahan kini sudah siap beroperasi mulai dari hari ini untuk mengambil sampah dari masyarakat dan membawanya ke tempat pembuangan sementara atau trans depo.

Mengingat besarnya jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru maka penanganan kebersihan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, sehingga Walikota memandang perlu adanya tugas yang harus diberikan kepada Kecamatan, salah satunya yaitu tentang pengelolaan kebersihan dalam menangani masalah sampah, dalam hal ini setiap kepala keluarga wajib membayar iuran sebesar Rp 30.000 per bulan untuk kepala keluarga menengah keatas, dan Rp. 20.000 per bulan untuk kepala keluarga menengah kebawah, dimana iuran ini gunanya adalah untuk peningkatan sektor pendapatan daerah. LPS dalam melaksanakan pengelolaan sampah dapat bekerja sama dengan bank sampah/pegepul/industri daur ulang.

Data yang diperoleh dapat diketahui bahwa dari 15 kecamatan di Kota Pekanbaru maka paling banyak adalah volume sampah yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai karena dinilai juga berdasarkan jumlah penduduk terbanyaknya. Berdasarkan hasil observasi peneliti ketahui bahwa besarnya volume sampah yang ada di

Kota Pekanbaru belum mampu terangkat oleh armada truk kebersihan yang dimiliki oleh pihak swasta dalam setiap harinya, maka terjadilah penumpukan sampah. Di dalam pengelolaan kebersihan terbukti belum optimal, hal ini ditandai dengan masih besarnya volume sampah yang menumpuk yang belum terangkat, ini merupakan akibat dari belum optimalnya pengelolaan kebersihan dan kurangnya sarana yang dimiliki seperti kurangnya tenaga kerja sehingga masyarakat harus membuang sampah ke TPS sendiri yang seharusnya petugas kebersihan yang mengangkut sampah dari rumah kerumah masyarakat, namun kenyataannya masyarakat yang mengangkut sampah ke TPS, hal ini diakibatkan kurangnya tenaga petugas kebersihan yang dimiliki. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien."

Sedangkan menurut Widiwijoto (2003:91), sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik yang telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Pengelolaan sampah (*solid waste management*) menurut Rachman (2024) merupakan permasalahan yang kompleks yang memerlukan penanganan dengan teknologi dan banyak disiplin ilmu, teknologi yang digunakan meliputi pengurangan sampah dari sumbernya, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir, dimana keseluruhan proses ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sosial masyarakat, dan panduan lingkungan hidup yang melindungi kesehatan masyarakat, memenuhi nilai estetika dan secara ekonomi. Untuk merespon perilaku masyarakat terhadap sampah dan pengelolaan sampah secara terpadu maka disiplin ilmu yang diperlukan antara lain: administrasi, keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota, ilmu lingkungan, dan teknik rekayasa.

Menurut (Sudrajat 2006:15) Pengelolaan sampah adalah dikerjakan sedemikian hingga dapat dimanfaatkan, atau diproses sedemikian hingga tidak membahayakan atau mengganggu lagi. Agar sampah ini tidak membahayakan kesehatan manusia, maka perlu pengaturan pembuangannya. Dalam hal

ini yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah yaitu :

- a. Penyimpanan
- b. Pengumpulan
- c. Pembuangan akhir sampah
- d. Pengolahan sampah

METODE

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif, karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Pendekatan yang dilakukan yaitu kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat di amati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu dapat di rekam atau di catat sebagai mana ia keluar dari sumbernya (Sugiyono, 2016:84). Bentuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey deskriptif yang menggambarkan keadaan sesungguhnya atau sebenarnya tentang Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kota Pekanbaru.

Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan alasan karena Dinas ini merupakan badan yang melakukan pengawasan pengelolaan sampah dan beberapa permasalahan karena penulis menemukan permasalahan terkait pengelolaan sampah yang masih belum terlaksana dengan optimal. Kemudian penelitian ini berfokus dilaksanakan di Kecamatan Marpoyan Damai khususnya di Kelurahan Maharatu karena merupakan wilayah yang paling banyak volume pengangkutan sampahnya.

Adapun yang menjadi informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini

adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Adanya beberapa informan dalam penelitian ini adalah pihak LPS Kota Pekanbaru, Lurah Maharatu dan masyarakat Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah merupakan pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sedangkan arti penting pengelolaan kebersihan itu sendiri yaitu untuk menjadikan suatu daerah/wilayah menjadi bersih dengan melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha, seperti penyapuan sampah, pengumpulan sampah dari lingkungan perumahan, perkotaan, perkantoran, hotel, restoran serta unit lainnya, dan membuangnya ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Untuk lebih jelasnya mengenai peran protokoler berikut dijelaskan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kota Pekanbaru yang dibagi dalam tiga indikator penelitian, yaitu:

1. Penyimpanan Sampah

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa informasi terkait permasalahan penyimpanan sampah yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai sudah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui LPS namun tetap saja tempatnya juga tidak mencukupi karena sampah semakin banyak pengangkutannya.

Hanya saja prosedur penyimpanan sampah yang dilakukan belum cukup tepat karena pengangkutan sampah hanya dilakukan satu kali dalam satu hari sehingga selalu ada sampah yang berserakan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap, peneliti menemukan bahwa isu atau informasi terkait penumpukan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai sudah diketahui secara lengkap oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tetapi belum ada inovasi prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga sampai saat ini selalu ada sampah yang berserakan di Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal hal ini dilihat dari belum adanya tindakan cepat atas penumpukan sampah di trans depo karena sampah yang diangkut bertambah banyak. Bukan hanya itu, belum ada prosedur pengelolaan sampah yang di buat hanya untuk melengkapi secara administrasi saja tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan.

2. Pengumpulan Sampah

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada LPS sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota. Pengumpulan sampah sudah ditetapkan oleh pihak dinas dan pemerintah kota untuk dibuang sementara ke trans depo yang sudah ada sebanyak empat trans depo di Kota Pekanbaru yang kemudian akan dibantu pengangkutannya lagi oleh pihak dinas

ke TPA Muara Fajar. Pengangkutan ini dinilai sudah efektif karena membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menemukan informasi bahwa pengangkutan sampah oleh pihak LPS ini sudah dinilai optimal dan efektif, namun permasalahannya yaitu waktu pengangkutan sampah yang belum bisa ditetapkan secara pasti, banyak juga masyarakat yang meletakkan sampahnya didepan rumah namun mobil LPS tidak datang untuk mengangkut sampah sehingga sampah tidak diambil di hari tersebut, sehingga menimbulkan penumpukan sampah di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk Kecamatan Marpoyan Damai dengan LPS, pengangkutan sampah diusahakan dilakukan secara optimal dengan waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan. Namun kendala tetap saja terjadi dalam segi waktu pengangkutan tersebut, yang menimbulkan pro kontra terhadap masyarakat yang sampahnya tidak diambil di hari yang sama karena keterlambatan mengumpulkan sampah.

3. Pemrosesan Akhir Sampah

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah pernah melakukan pemantauan atau pengawasan secara langsung ke lapangan. Sudah ada armada angkutan yang bertugas khusus untuk mengangkut sampah dari Kecamatan Marpoyan Damai ke TPA Muara Fajar melalui LPS, armada angkutan sampah yang mengangkat sampah juga ada menggunakan armada angkutan dari DLHK. Pemantauan ini sudah dilakukan

secara efektif dan optimal agar pelaksanaan program LPS ini juga dapat berjalan secara optimal dan hasil program ini dapat terwujud.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menemukan informasi bahwa tidak ada pegawai DLHK yang turun lapangan untuk memantau atau mengawasi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, namun untuk pemantauan masalah pengangkutan sampah melalui LPS di lingkungan masyarakat sepenuhnya dilakukan oleh ketua dan anggota LPS bahkan pihak RT agar masyarakat dapat secara langsung dapat memberikan pendapatnya terkait dengan program LPS yang sedang dilaksanakan. .

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa belum ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Kecamatan Marpoyan Damai. Sudah ada angkutan secara khusus bertugas mengangkut sampah dari Kecamatan Marpoyan Damai melalui LPS.

4. Pengelolaan Sampah

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa bank sampah yang dibentuk belum berjalan sesuai dengan harapan, karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank sampah ini sehingga sampah yang bisa dimanfaatkan pun tidak dapat dikelola oleh masyarakat. Untuk itu pihak DLHK masih punya tanggungjawab besar dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah melalui bank sampah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menemukan informasi bahwa masyarakat kurang tertarik untuk mengikuti program bank sampah ini bahkan sebagian masyarakat

tidak mengerti akan program bank sampah ini, untuk itu pentingnya penyuluhan dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat paham arah dan tujuan bank sampah ini akan membawa keuntungan tersendiri dari sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa program pengelolaan sampah melalui rumah kompos dan bank sampah ini belum sama-sama efektif dan optimal dilakukan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap program tersebut. Besar harapan masyarakat untuk memperoleh informasi dan penyuluhan terhadap kedua program pengelolaan sampah ini.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi peran camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan sampah berbasis masyarakat meliputi:

1. Tingkat Kesadaran

Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat merupakan hal yang paling utama dalam keberhasilan proses program LPS ini karena masih ada masyarakat yang keberatan dalam membayar iuran pengangkutan sampah ini. Tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program pengangkutan sampah merupakan hal yang mustahil pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam terlaksananya program LPS di Kecamatan Marpoyan Damai yaitu disebabkan karena tingkat kepedulian yang rendah, tingkat ketertarikan yang rendah dan tingkat kesibukan yang tinggi.

2. Ketersediaan Lahan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat praktik lapangan di Kecamatan Marpoyan Damai diketahui

bahwa masyarakat sangat ingin melakukan pengolahan dan pembuangan sampah namun terkendala dengan ketersediaan lahan. Kebutuhan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah tidak hanya cukup dalam memberikan sosialisasi/pelatihan saja namun perlu adanya dukungan dari pihak setempat agar lebih memberikan kesadaran masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat lainnya dalam pengangkutan sampah adalah sarana prasarana pengelolaan sampah. Sarana prasarana ini penting ketersediaannya yaitu untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan sampah, dengan tercukupinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah ini maka permasalahan sampah akan teratasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, LPS dibentuk dengan tujuan masalah pengangkutan sampah dapat diatasi dengan cepat, namun masih terdapat permasalahan terkait dengan penerapannya salah satunya kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan menyebabkan penumpukan sampah.

2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kota Pekanbaru adalah : tingkat kesadaran masyarakat, ketersediaan lahan serta sarana prasarana. Strategi yang dilakukan Camat dalam

mengoptimalkan pengangkutan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai adalah dengan melakukan langkah-langkah strategis seperti sosialisasi program, menyediakan pelatihan bagi masyarakat dan melakukan koordinasi dengan pihak lain serta lembaga pemerintah yang membidangi persampahan yaitu DLH Kota Pekanbaru untuk bekerja sama dalam penanganan dan pengurangan sampah melalui LPS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul, Ruslan Ghofur Noor. 2014. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Afan, Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ali, Zaini Dan Alhafis Imam Raden. 2015, *Teori Kebijakan Public*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Amsyah, Zulkifli. 2005, *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Caiden, Gerald E.1991. *Administrative Reforms Comes Of Ages*. New York: Walter The Gruyter terjemahan Sundari.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta.
- Creswell, J. W. 2016. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. 4th ed*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Cushway, B dan Derek Lodge. 2002. *Perilaku dan Desain Organisasi*. Jakarta : PT. Elex. Media Komputindo.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Dessler, Gary. 1997. *Management Sumber Daya Manusia. Terjemahan. Benyamin. Molan. Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Prenhallind.
- Donovan, F. dan A.C. Jackson. 1991. *Managing Human service organizations*. New York. N.Y.: Prentice Hall.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Dwidjowijoto, R. N. 2008. *Publik Policy*. Jakarta : Elek Media Komputindo.
- Edwin B. Flippo, 2004. *Personel Management (Manajemen Personalia), Edisi VII Jilid II, Terjemahan Alponso*. Jakarta : Erlangga.
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- George R.Terry dan Leslie.W. Rue, 2001. *Dasar-Dasar Manajemen, alih bahasa, G.A. Ticoalu*. Jakarta: Bina Aksara.
- Gibson, James, L. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Edisi ke-5. Cetakan ke-3*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hasibuan, Malayu. S. P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim Indra Wijaya, 2004. *Prilaku Organisasi*. Bandung : Sinar Baru.

Mutia Fadillah Bahar, Sylvina Rusadi

Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelola Sampah (Lps) Di Kota Pekanbaru(Hal 1137-1145)

Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.

Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI.

Leo Agustino. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

Manullang. 2004. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFEE.

Nawawi, Ismail. 2009. *Prilaku Administrasi Kajian,Teori dan Praktis*,. Surabaya: ITSPers.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta : Rineka Cipta.

Nogi, Hessel dkk. 2008. *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lukman Offset Yogyakarta.

Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2007. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Pressman, Jeffrey L. 1976. *The Limits of Administration*. By Christopher C. Hood. (London: Wiley DOI: <https://doi.org/10.2307/1954203> Published online by Cambridge University Press: 01 August 2014

Pressman, J.L dan Aaron Wildavsky, 2012, *Implementation: How Great Expectation in Washington Are Dased in Oakland*, London: California Press.

Saefudin, Mar. 1993. *Organisasi dan Manajemen Industri (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta.

Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.

Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan*. Cetakan Ketiga belas, Jakarta : Bumi Aksara.

Singarimbun, M. 2006. *Metode penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

Soekarno. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan XIV*. Jakarta : Miswa.

Solly Lubis M. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi, Edisi II*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta, CV

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. : Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Edisi revisi. Cetakan kedua*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.

Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wibawa, Samudra. 2009. *Administrasi Negara : isu-isu kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Widya Wicaksono. Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi*. Graha. Binu. Yogyakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah